

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam dunia usaha yang semakin cepat mengharuskan perusahaan untuk merespon perubahan yang terjadi, masalah pokok yang dihadapi perusahaan-perusahaan saat ini adalah bagaimana perusahaan tersebut menarik pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang. Salah satu perusahaan yang harus memenuhi hasrat hidup masyarakat ialah PDAM yang di bawa naungan BUMD yang ditugaskan untuk melayani setiap masyarakat yang ingin mengkonsumsi air bersih tetapi dalam konteks ini PDAM dengan tugas yang dia embani, juga harus bisa mengatur pendapatan usaha mereka.

Perusahaan daerah air minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu pada keuntungan. Salah tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Apabila merujuk pada keputusan Menteri Dalam Negeri No: 690-069 tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Pengelolaan PDAM, disana

ditegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, di mana dalam menjalankan fungsinya PDAM diharapkan mampu membiayai diri sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya, di samping itu PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada pemda.

Dari ketentuan yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih dan tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang memadai. Adanya kepentingan pelayanan publik yang terus berkembang menyebabkan PDAM tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi pendapatan pada perusahaan. Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut pengelolaan PDAM masih dihadapkan pada inefisiensi bahkan cenderung mengedepankan fungsi pelayanan, sehingga berdampak pada keberadaannya membebani keuangan daerah.

Berkaitan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pengelolaan operasi PDAM diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiridan diharapkan dapat menopang pembiayaan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam jangka pendek serta mampu memberikan kontribusi pada penerimaan daerah untuk jangka waktu panjang.

Mengingat keberadaan PDAM dibiayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, maka dalam pengelolannya harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, baik itu dalam aspek

pengelolaan keuangan aspek operasional serta admistrasinya, karena dari ketiga aspek yang dimaksud sangat mungkin berpengaruh pada pendapatan usaha yang diperoleh oleh PDAM.

Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT menjadi pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan aktifitas lainnya, sangat membutuhkan pelayanan air bersih yang cukup ke depan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kupang dan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif pesat, tercatat rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kota Kupang sekitar 2,68% per tahun dengan jumlah penduduk sebesar 283.035 jiwa pada tahun 2008. Dengan semakin beragamnya aktivitas ekonomi serta pembangunan sarana dan prasarana kota mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam fasilitas yang tentu sangat signifikan terhadap kebutuhan akan pelayanan air bersih (Profil PDAM Kota Kupang , 2012).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2005 mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), tentang tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PDAM Kota Kupang selaku penyelenggara pengembangan SPAM juga ikut memikul tanggung jawab tersebut.

PDAM Kota Kupang secara resmi terbentuk pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kota Kupang No. 06 Tahun 2005 dan manajemen PDAM Kota Kupang mulai aktif beroperasi pada tanggal 3 April 2009 dengan dilantikannya Dewan Direksi PDAM Kota Kupang oleh Walikota Kupang. Aset PDAM Kota Kupang seluruhnya berasal dari aset UPTD Air Bersih Kota Kupang yang terbentuk pada tahun 2003 dibawah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Kupang. Pelayanan air bersih di Kota Kupang saat ini dilayani oleh 2 instansi yaitu PDAM Kota Kupang dan PDAM Kabupaten Kupang dengan kapasitas debit 259,9 l/dt. Cakupan pelayanan diperkirakan baru mencapai kurang lebih 50 % dari total jumlah penduduk Kota Kupang tahun 2008.

Jumlah sambungan PDAM Kota Kupang sampai dengan tahun 2012 berdasarkan audit kinerja tahun 2012 adalah 3.876 sambungan. Dari jumlah pelanggan pada akhir tahun 2012 tersebut, jika dihitung dengan besaran cakupan pelayanan yang dicapai oleh PDAM Kota Kupang baru mencapai 6,78% atau sebesar 23.256 jiwa (Asumsi 1 SR = 6 orang) dari seluruh jumlah penduduk Kota Kupang yang menurut dokumen Kota Kupang dalam angka tahun 2012 telah mencapai 342.892 Jiwa.

Secara umum pelayanan pelanggan PDAM Kota Kupang telah dilakukan dengan baik. Sebagian besar pelanggan merasa puas dengan kemudahan dan kenyamanan pembayaran rekening, serta komunikasi yang dilakukan oleh PDAM Kota Kupang.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan optimalisasi, meningkatkan kapasitas dan mengembangkan wilayah pelayanan air bersih secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan dalam mengeksploitasi potensi sumber-sumber air yang masih terkandung didalam wilayah administrasi Kota Kupang. Untuk mendukung program tersebut maka Pemerintah Kota Kupang berupaya mendukung PDAM Kota Kupang melalui penyertaan modal sebagai penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Tujuan terbentuknya PDAM Kota Kupang adalah menyediakan jasa pelayanan kebutuhan air bersih kepada warga Kota Kupang dan turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

PDAM Kota Kupang adalah salah badan layanan air bersih yang terdapat di kota kupang, untuk mendapatkan pendapatan yang memungkinkan Produk yang dihasilkan oleh perusahaan daerah air minum Kota Kupang yaitu air bersih yang diperuntukkan kepada masyarakat yang ingin mengkonsumsinya, selain dari itu aspek aspek yang sudah tertera di atas juga bisa berpengaruh pada keutuhan pendapatan perusahaan, seperti, aspek administrasi bilamana sewaktu-waktu biaya pemasangan SR baru akan naik itu akan mengakibatkan atau berdampak pada banyaknya pelanggan yang tidak mau membayar air hingga berbulan-bulan jalan terakhir yang dipilih

PDAM ialah memutuskan sambungan layanan dengan konsumen, kejadian ini bisa saja berpengaruh dengan tingkat pendapatan usaha perusahaan, aspek yang kedua adalah jumlah pelanggan yang tidak sesuai dengan standar peraturan pemda kota kupang khususnya PDAM Kota Kupang.

Berdasarkan pada uraian yang dijelaskan, maka judul yang saya ambil untuk kasus ini adalah "***PENGARUH JUMLAH PELANGGAN, BIAYA PEMASANGAN DAN BEBAN USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA PDAM KOTA KUPANG***".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang diangkat pada penelitian ini: " Bagaimana pengaruh jumlah pelanggan, biaya pemasangan dan beban usaha terhadap pendapatan usaha PDAM Kota Kupang?"

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh jumlah pelanggan, biaya pemasangan dan beban usaha terhadap pendapatan usaha PDAM Kota Kupang.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh PDAM Kota Kupang dalam mengatasi masalah-masalah atas pendapatan perusahaan.

-
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.